



## RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023 – 2026



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022  
JL. PULAU PONGOK AIR ITAM PANGKALPINANG

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang berisi upaya-upaya pembangunan ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan program selalu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pencapaian setiap output dan outcome kinerja Penyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dimaksudkan untuk Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan, Rencana Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Provinsi kepulauan Bangka Belitung sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Tenaga Kerja harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, akan dilakukan evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjawab seluruh tantangan dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan khususnya pada 5 (lima) tahun kedepan. Program-program Ketenagakerjaan

dan Ketransmigrasi tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung beserta penanggulangannya yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit pada perencanaan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi. Apabila terdapat perubahan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang belum diakomodasikan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dapat disesuaikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk dijadikan arahan dan acuan semua Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2

1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2 Sumber Daya .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>61</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	61
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah terpilih .....	63
3.3 Telaahan Renstra K/L .....	64
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	66
3.5 Penentuan Isu Strategis.....	66
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>68</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	68
4.2 Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dengan tujuan dan sasaran RPJMD .....	72
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>74</b>
5.1. Strategi dan arah kebijakan OPD .....	74
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .</b>	<b>78</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	78
6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan	

Pendanaan dan Indikatif .....	80
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG</b>	
<b>URUSAN .....</b>	<b>90</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>100</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Daftar Pegawai Menurut Eselon	15
Tabel 2.2	Daftar Pegawai Menurut Golongan	16
Tabel 2.3	Daftar Pegawai Menurut Pendidikan	16
Tabel 2.4	Keadaan aset Dinas Tenaga Kerja	17
Tabel 2.5	Perkembangan APBD Dinas Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Belitung	19
Tabel 2.6	APBD Dinas Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017	20

Tabel 2.7	Perkembangan data indikator makro ketenagakerjaan Prov. Kep. Bangka Belitung	21
Tabel 2.8	Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.9	Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.10	Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.11	Pengangguran Terbuka Berdasarkan jenis Kelamin	22
Tabel 2.12	TPT Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.13	TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.14	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2013 s.d 2016	25
Tabel 2.15	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2013 s.d 2016	26
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut jumlah jam kerja perminggu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2013 s.d 2016	28
Tabel 2.17	Perkembangan data petempatan, pencari kerja lowongan kerja, tenaga kerja asing, dan data transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30

Tabel 2.18	Data perkembangan tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun s.d 2016	32
Tabel 2.19	Data pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2017	33
Tabel 2.20	Perkembangan Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pengawasan Ketenagakerjaan Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2012-2016	34
Tabel 2.21	Data Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2017	35
Tabel 2.22	Perkembangan Upah Minimum Prov. Kep. Bangka Belitung 2012-2017	37
Tabel 2.23	Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan RPJMD 2012-2017	396 +
Tabel 2.24	Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013-2017	42
Tabel 2.25	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	70
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2017-2022	77
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	100

### **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2012- 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional (%)	31
Grafik 2.2	Kepesertaan Tenaga Kerja yang menjadi anggota Jamsostek Tahun 2012-2016	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang disusun dengan pertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain :

1. Penetapan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPJMD Tahun 2023-2026.
2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

- Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 6 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategi Tahun 2023-2026 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memudahkan aparaturnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta masyarakat pada umumnya untuk memahami tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama lima tahun kedepan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam

kurun waktu lima tahun kedepan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja.

3. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja Provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam menjabarkan visi, misi, dan arah
4. Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi sebagai berikut :

- Bab I     Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II    Gambaran pelayanan OPD menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
- Bab III   Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi menjelaskan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program, telaahan renstra K/L dan Renstra Daerah Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV    Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- Bab V     Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI    Rencana program dan kegiatan serta Pendanaan.

Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan  
ketenagakerjaan.

Bab VIII Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 6 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja**

Tugas : Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi.
- b. Penyelenggaraan Kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas ketenagakerjaan dan ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja; d. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- e. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;

- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan lingkup dinas;
- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPDA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;

- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- m. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- n. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- o. penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- p. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- q. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- r. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Bidang pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**

Bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial. (2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;

- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
- c. penyelenggaraan koordinasi terkait pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
- j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. penyelenggaraan pembinaan pegawai ASN; dan
- l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. penyelenggaraan dan pengorganisasian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
- c. penyelenggaraan dan pengorganisasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan

- pengembangan usaha, program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian promosi dan informasi akreditasi pelaksanaan serta mengawasi status akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - f. penyelenggaraan pengkajian kebutuhan, penyiapan bahan calon peserta serta penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi, program pelatihan dan pemagangan, instruktur dan tenaga pelatihan;
  - g. penyelenggaraan pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi, dan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - h. penyelenggaraan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - i. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - j. penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Kabupaten/Kota;
  - k. penyelenggaraan pengoordinasian promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
  - l. penyelenggaraan evaluasi penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  - m. penyelenggaraan evaluasi dokumen pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(RPTKA) dan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

n. penyelenggaraan pengoordinasian sosialisasi terhadap Subbagianstansi perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;

o. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK);

p. penyelenggaraan pelayanan bursa kerja melalui fasilitasi pertemuan dan/atau kerjasama dengan perusahaan;

q. penyelenggaraan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan terhadap mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan rencana teknis tata ruang permukiman dan penyediaan lahan areal transmigrasi;

r. pengembangan verifikasi usulan penerbitan Surat Keterangan Hak Pengelolaan Lahan (SK HPL) dan Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan);

s. penyelenggaraan pengoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana, penempatan dan perbekalan transmigran serta penataan lingkungan transmigrasi;

t. penyelenggaraan pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan peningkatan keterampilan transmigrasi dalam pengembangan usaha transmigrasi;

u. penyelenggaraan promosi pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman,

penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha;

v. penyelenggaraan verifikasi bahan pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha;

w. penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha;

x. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

y. penyelenggaraan pembinaan pegawai ASN; dan

z. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, sertifikasi dan pemagangan bagicalon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis pelatihan keterampilan dan rencana kerjasama pelatihan keterampilan dengan instansi terkait, swasta dan lembaga latihan kerja atau pihak ketiga serta pelatihan swadana.

2. Pelaksanaan program kegiatan pelatihan keterampilan institusional, non institusional atau mobile training unit (MTU), pelatihan produksi dan uji keterampilan.
3. Pemasaran program dan fasilitas UPTD BLKI, hasil produksi dari pelatihan, jasa/konsultasi pelayanan informasi pelatihan keterampilan.
4. Penyusunan program pelatihan, pemagangan, pelaksanaan kegiatan OJT.
5. Penyusunan monitoring dan evaluasi program pelatihan.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 6 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahi :
  - 1) Seksi pengawasan ketenagakerjaan
  - 2) Seksi Penegak Hukum
  - 3) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
4. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi:
  - 1) Seksi pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas
  - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK)

### 3) Seksi Transmigrasi

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 98 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, yaitu : UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)

## 2.2. Sumber Daya

Susunan Kepegawaian Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung posisi Desember 2021 berjumlah 96 orang, laki-laki 69 orang dan perempuan 34 orang. Dari jumlah pegawai di atas terdiri dari satu orang pejabat struktural eselon II, Eselon III jumlahnya 5 orang, dan yang menduduki jabatan eselon IV berjumlah 16 orang, Selain pejabat struktural ada beberapa jabatan fungsional sebanyak 46 orang, kemudian jabatan fungsional umum 34 orang, sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Menurut Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Kepala Dinas	II		1 orang
2.	Sekretaris Dinas	III	1 orang	-
3.	Kepala Bidang	III	3 orang	0 Orang
4.	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/Sub Koordinator/Ka.UPT	IV	8 orang	3 orang
5.	Fungsional :		30 orang	16

	Pengantar Kerja		-	-
	Mediator Hubungan Kerja		3 orang	2 orang
	Pengawas Ketenagakerjaan		20 orang	7 orang
	Instruktur BLK		15 orang	4 orang
	Instruktur Produktifitas		2 orang	2 orang
	Penggerak Swadaya masyarakat		0 orang	2 orang
	Penguji K3		1 orang	1 orang
	Pranata Humas		1 orang	-
	Pranata Komputer		1 orang	-
6.	Jabatan Fungsional Umum		21 orang	13 orang
<b>Jumlah PNS</b>			<b>63 orang</b>	<b>33 orang</b>

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Prov. Kepulauan Bangka Belitung 2021

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh golongan III, sebanyak 73 orang atau 78,5 % dari jumlah seluruh pegawai, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2  
Daftar Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Golongan IV	12 orang	3 orang
2.	Golongan III	44 orang	29 orang
3.	Golongan II	5 orang	3 orang

<b>Jumlah</b>	<b>61 orang</b>	<b>35 orang</b>
---------------	-----------------	-----------------

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Belitung 2021

Jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3  
Daftar Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S.2	6 orang
2.	S.1	77 orang
3.	D.IV	1 Orang
3.	D.III	6 orang
4.	SLTA	6 orang
<b>Jumlah Pegawai PNS</b>		<b>96 orang</b>

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Belitung 2021

Sedangkan untuk sumber daya asset Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4  
keadaan asset Dinas tenaga Kerja

NO	BIDANG BARANG	SALDO PER 31 DES. 2021
<b>I</b>	<b>POSISI BMD DALAM NERACA (A + B)</b>	<b>Rp 31.464.910.457,00</b>
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>Rp 1.583.000,00</b>

<b>A.1</b>	<b>Persediaan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.583.000,00</b>
<b>B</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>Rp</b>	<b>31.087.703.689,00</b>
<b>B.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>Rp</b>	<b>28.288.526,00</b>
<b>B.2</b>	<b>Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>Rp</b>	<b>19.727.721.462,00</b>
B.2.1	Alat-alat besar	Rp	6.000.000,00
B.2.2	Alat-alat Angkutan	Rp	2.239.374.440,00
B.2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	7.759.653.436,00
B.2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp	12.000.000,00
B.2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	3.446.348.370,00
B.2.6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp	229.658.461,00
B.2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp	465.281.414,00
B.2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp	3.700.360.948,00
B.2.9	Komputer	Rp	1.869.044.393,00
<b>B.3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp</b>	<b>32.334.277.372,00</b>
B.3.1	Bangunan Gedung	Rp	3.253.334.643,00
B.3.2	Bangunan Menumen	Rp	97.500.000,00
<b>B.4</b>	<b>Jalan, Irigasi &amp; Jaringan</b>	<b>Rp</b>	<b>502.385.350,00</b>
B.4.1	Jalan dan Jembatan	RP.	2.344.568.000,00
B.4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp.	60.826.000,00
B.4.3	Instalasi	RP.	144.975.000,00
B.4.4	Jaringan	Rp.	1.058.482.750,00
<b>B.5</b>	<b>Asset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
B.5.1	Buku Perpustakaan	Rp	-
B.5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp	-
B.5.3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	Rp	-
B.5.4	Lain-lain	Rp	-
<b>B.6</b>	<b>Konstruksi dlm pengerjaan</b>	<b>Rp</b>	<b>694.840.000,00</b>
<b>B.7</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>25.634.043.693,00</b>
<b>C</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>Rp</b>	<b>407.132.869,00</b>
<b>C.1</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>C.2</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>Rp</b>	<b>407.132.869,00</b>
<b>II</b>	<b>BMD NON NERACA</b>	<b>Rp</b>	<b>1.310.386.175,00</b>
<b>A</b>	<b>BMD EKSTRAKOMTABLE</b>	<b>Rp</b>	<b>1.310.386.175,00</b>
	<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>Rp</b>	<b>32.775.296.632,00</b>

## 2.3. Kinerja Pelayanan

### 2.3.1 Capaian Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung dengan anggaran berbasis kinerja, maksudnya adalah setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, perkembangan APBD dari Tahun 2017-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5  
Perkembangan APBD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah (Rp.)	Belanja Pegawai /BTL (Gaji/TPP)	Jumlah Belanja Langsung (BL)
1	2017	26.544.323.100	15.762.254.200	10.782.068.900
2	2018	20.686.050.686	14.315.524.068	6.370.526.068
3	2019	23.468.067.151	14.313.625.904	9.154.441.247
4	2020	21.043.188.523	14.154.673.308	6.888.515.215
5	2021	20.939.184.073	14.408.988.308	6.530.197.765
6	2022	26.544.323.100	13.614.284.006	4.301.288.437

*Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun  
2021*

Jumlah APBD Dinas Tenaga Kerja setiap tahunnya rata-rata meningkat terus, yang paling signifikan adalah pengurangan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2022 dikarenakan adanya covid 19 sehingga banyak kegiatan yang mengalami refocusing tahun selanjutnya dirinci alokasi anggaran sesuai dengan urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.6  
APBD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2017-2022 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No	Tahun	Non Urusan	Urusan Wajib (Rp)	Urusan Pilihan (Rp)
----	-------	------------	----------------------	------------------------

1	2017	5.805.795.500	4.505.785.900	470.487.500
2	2018	6.831.654.150	9.601.649.600	443.695.800
3	2019	7.595.728.000	12.015.207.950	1.032.343.300
4	2020	7.353.093.673	9.378.949.750	1.419.825.500
5	2021	5.923.427.900	5.626.217.000	1.304.213.224
6	2022	5.805.795.500	4.505.785.900	470.487.500

*Sumber Data : Sub bagian Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021*

### **2.3.2 Capaian Kinerja**

Struktur umur merupakan informasi yang sangat penting berkaitan dengan perkembangan persentase kelompok sasaran pembangunan, dan Proporsi penduduk usia kerja (produktif) menentukan tingkat capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016 berdasarkan data Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 1.022.955 orang, dari jumlah tersebut angkatan kerja sebanyak 705.173 orang, dan yang bekerja jumlahnya mencapai 686.830 orang, berarti tingkat kesempatan kerjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 86.08%. Berikut ini disajikan tabel data indikator makro ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari total angkatan kerja sebesar 94,97 persen diantaranya bekerja dan sisanya 5,03 persen merupakan pengangguran.

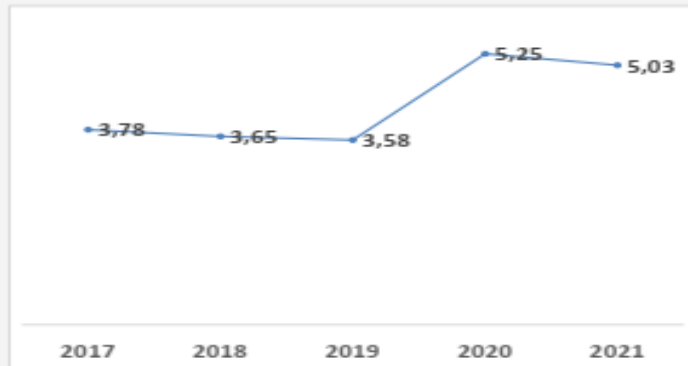
Persentase penduduk yang bekerja apabila dilihat menurut gender, penduduk laki-laki yang bekerja persentasenya lebih tinggi dibanding penduduk perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 65,88 persen. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (46,86 persen) lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (83,68 persen).

Tabel 2.7



## TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Data tersebut di atas digunakan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diukur berdasarkan beberapa indikator :

- Pertama : Indikator Kinerja Sasaran RPJMD dan IKU Tahun 2012-2017
- Kedua : Indikator target sasaran dan program Renstra
- Ketiga : Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenagakerjaan

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 2.24  
 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Indikator  
 Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012-2017

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi				60 %	75 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	87 %	9,32 %		167%	133%	102%	10%	
2	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan				50 %	80 %	80 %	100 %	100 %	62,4 %	100 %	90 %	83,08 %		125%	125%	113%	83%	
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				2 %	3 %	5 %	10 %	10 %	0,7 %	0 %	0,5 %	8,31 %		35%	0%	10%	83%	

4	Persentase Penyelesaian Kasus				30 %	40 %	45 %	50 %	60 %	28,9%	30,9%	45,7%	62,39%		96%	77%	102%	125%	
5	Persentase kenaikan UMP				5 %	5 %	10 %	10 %	10 %	28 %	29 %	11 %	10 %		560%	560%	110%	100%	
6	Persentase pemeriksaan perusahaan				30 %	35 %	40 %	50 %	60 %	36 %	54,9%	70,9%	90,91%		120%	157%	177%	182%	
7	Persentase Pengujian Peralatan di perusahaan				10 %	25 %	35 %	40 %	50 %	100 %	100 %	93,6 %	62,83 %		1000%	400%	267%	157%	
8	Persentase Transmigrasi yang menempati wilayah bangka belitung				25 KK	25 KK	25 KK	0 KK	10 KK	0 KK	43 KK	25 KK	0 KK		0 %	172%	100%	0%	

*Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Belitung*

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

### **2.4.1 Tantangan**

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kompetensi adalah rendahnya kualifikasi angkatan kerja yang terindikasi pada komposisi angkatan kerja menurut pendidikan. Walaupun penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpendidikan lebih tinggi namun kondisi tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tetap sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, khususnya pada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tinggi. Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu adanya pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi. Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Dunia pendidikan harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur *knowledge*, *skills* dan *attitudes*.

Rendahnya penyerapan angkatan kerja antara lain juga dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja.

Sementara itu, globalisasi pasar kerja juga mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak hanya pada jabatan manajerial dan tenaga

ahli, tetapi sampai tingkat teknisi dan operator yang jumlahnya tidak sedikit. Kehadiran tenaga kerja asing dirasa sangat mengancam kesempatan kerja di pasar dalam negeri, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia pada tingkat menengah ke bawah yang jumlahnya sangat banyak.

### **Peluang**

Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, antara lain yaitu :

#### **1. Peraturan Perundang-undangan**

Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur.

Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja regulasi yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (*sistem*) perencanaan orientasi pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2023-2026

## **BAB III**

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai instansi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran perannya diharapkan optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama disusun berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi, dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, terdapat beberapa permasalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2023-2026, diuraikan sebagaimana berikut :

#### 1. Urusan Ketenagakerjaan

Kurangnya kompetensi dan kualitas pencari kerja dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas dan kurang harmonisnya Hubungan Industrial di perusahaan ;

#### 2. Urusan Ketransmigrasian

keterbatasan lahan sebagai lokasi permukiman transmigrasi, masih kurangnya pemerataan kesejahteraan dan kurangnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Dapat lihat dari tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Kurangnya kompetensi dan kualitas pencari kerja	Belum merata minat pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Pendidikan yang belum sesuai dengan klaster kompetensi
1.	Kurangnya tenaga kerja yang ditempatkan	Rendahnya tingkat pendidikan	Tingginya jumlah penduduk lulusan SD, SMP
2.	Kurang harmonisnya Hubungan Industrial di perusahaan	Belum seluruh perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial yang sesuai standart	Minimnya pengetahuan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan
3.	Rendahnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung	Masih rendahnya kesejahteraan warga transmigrasi	Kurangnya produktifitas transmigran

Sedangkan berdasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu strategis urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja
- Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan

- Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih**

**Wakil**

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2023-2026 adalah *“Babel sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”*.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 – 2026, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L**

Penetapan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga maupun renstra kabupaten.

Berikut adalah Arah Kebijakan dan Program Kementerian :

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja dilaksanakan melalui program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dengan sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan melalui program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memperoleh fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
3. Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dengan sasaran diterapkannya prinsip-prinsip Hubungan Industrial di tempat kerja;
4. Peningkatan peran perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan sasaran meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja;
5. Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan) melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dan program perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sampai saat ini belum teridentifikasi.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sampai saat ini secara ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan sektor pertambangan dan sektor pertanian. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi sementara sektor pertambangan memiliki keterbatasan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sektor pertanian memiliki keterbatasan ketersediaan lahan, maka mutlak diperlukan adanya perubahan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas produktifitas tenaga kerja dan pembinaan Hubungan Industrial dan kesehatan kerja, serta penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan.

Berikut ini adalah Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

1. Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
2. Kurang harmonisnya Hubungan Industrial di tempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Rendahnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan di susun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Tujuan Renstra Dinas tenaga Kerja Provinsi ada 2, yaitu :

1. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
2. Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Sedangkan Indikator Tujuan ada 2, yaitu :

1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
2. Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi
3. Tingkat pengangguran terbuka
4. Indeks Reformasi Birokrasi

No	Tujuan	Indikator	Target (%)			
			1	2	3	4
1	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	66.95	67.3	67.85	68.24
2	Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi				

3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi				
---	---------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja ada 4, yaitu :

1. Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan
2. Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan
3. Meningkatnya Satuan Pemukiman Yang Telah Mendapat Binaan
4. Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah

Sedangkan indikator sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Presentase Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan
2. Persentase peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan
3. Persentase Satuan Pemukiman Yang Dibina
4. Nilai RB Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	0,19%	0,24%	0,24%	0,29%

2.	Menurunnya Disparitas Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat	Indeks Williamson	Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun				
3	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi				

## **4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Mengacu pada RPJMD 2023-2026, visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu: *“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”*, dengan 6 misi yaitu :

7. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
8. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
9. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
11. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
12. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

### **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah (misi**

**1),** tujuan 1: *Meningkatnya pertumbuhan ekonomi*, dengan sasaran:

- Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan
- Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan
- Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata
- Meningkatnya Produksi sektor pertambangan

*tujuan 2 : Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat*, dengan sasaran:

- Meningkatnya belanja pemerintah daerah
- Menurunnya angka Pengangguran

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategis dan Kebijakan OPD**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai tujuan pada renstra 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1  
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2023-2026

**Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi**

**Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan</p> <p>2. Meningkatnya Kesempatan Kerja</p> <p>3. Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan</p>	<p>1. Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan</p> <p>2. Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan</p> <p>3. Meningkatnya Satuan Pemukiman Yang Telah Mendapat Binaan</p>	<p>1. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang pertanian</p> <p>2. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan</p> <p>3. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang pariwisata</p> <p>4. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang pertambangan</p> <p>5. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang lainnya</p>	<p>1. meningkatnya kemitraan dengan perusahaan dibidang pertanian</p> <p>2. meningkatnya kemitraan dengan perusahaan dibidang kelautan dan perikanan</p> <p>3. meningkatnya kemitraan dengan perusahaan dibidang pariwisata</p> <p>4. meningkatnya kemitraan dengan perusahaan dibidang pertambangan</p> <p>5. Meningkatnya penempatan tenaga kerja</p>

--	--	--	--

<b>Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</b>			
<b>Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah		

<b>Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</b>			
<b>Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Pemukiman Yang Mendapat Binaan Satuan Yang Telah		

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA**  
**PENDANAAN**

**6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja adalah meningkatnya kualitas pencari kerja dan warga transmigrasi guna menurunkan Angka

Pengangguran, menurunnya Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan, yang diimplementasikan dalam Program dan kegiatan.

Keseimbangan antara dunia usaha dengan kesejahteraan pekerja yang dicirikan dengan meningkatnya upah minimum. Meningkatnya upah riil akan menyebabkan daya beli pekerja meningkat pula, dan pada tahap selanjutnya akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang akan mengembangkan dunia usaha. Kondisi ketenagakerjaan saat ini perubahannya sangat dinamis, dengan tingginya penetapan Upah Minimum setiap tahun, di sisi lain diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi sisi lainnya biaya operasional perusahaan semakin berat, berdampak terhadap kelangsungan perusahaan, lebih utama diindikasikan perusahaan akan melakukan rasionalisasi tenaga kerja, penghentian sementara penyerapan tenaga kerja, dan dikhawatirkan apabila beban perusahaan makin tinggi akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), yang kembali akan menjadi beban Pemerintah.

Urusan Ketenagakerjaan acuan kinerjanya tercantum dalam Misi 1 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, yaitu: “pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah” guna mencapai visi RPJMD yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi” melalui strategi Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan dan bidang lainnya, Meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja rentan, Meningkatkan kesempatan kerja pada sektor formal, meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja, Meningkatkan perlindungan, keselamatan dan kesehatan tenaga dan Meningkatkan potensi penggalan sumber PAD.

Program untuk mendukung misi ini adalah sebagai berikut:

### **Urusan Ketenagakerjaan**

- a. Program perencanaan tenaga kerja

- b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- c. Program penempatan tenaga kerja
- d. Program hubungan industrial
- e. Program pengawasan ketenagakerjaan

### **Urusan Ketransmigrasian**

- a. Program pengembangan kawasan transmigrasi

Tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja tidaklah mudah karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan pekerja se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu upaya yang serius dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial; dan meningkatkan ketersediaan lokasi transmigrasi dan pengerahan serta penempatan transmigran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 6(enam) program.

## **6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dirumuskan disajikan menggunakan Tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan**  
**Indikatif**  
**Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	tujuan	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi awal (APBD P) 2022		2023		2024		2025	
					Target Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kegiatan	Pagu Anggaran
	<b>Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan</b>		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai sakiip								
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
			Administrasi Keuangan	Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)								
			Administrasi umum	survey kepuasan pelayanan umum (angka)								
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)								
	<b>Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<b>1.Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten</b>			5	5.000.000.000	5.25	5.000.000.000	5,50	5.000.000
				<b>2. Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja</b>								

			Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja								
				2. Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Program								
							9	600.000.000	9	750.000.000	9	900.000.000
	<b>Meningkatnya Kesempatan Kerja</b>	<b>Tingkat pengangguran terbuka</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan								
			Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja								
			Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan								
	<b>Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota								
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Dokumen Rencana tenaga Kerja			1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000

	<b>Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial								
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama								
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provisni								
	<b>Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan								
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan								
5	<b>Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja</b>	<b>meningkatnya Perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				<b>183.705</b>		<b>445.000</b>		<b>450</b>	
				<b>Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>





			pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan pengujian lingkungan kerja dai UMKM	Jumlah UMKM yang diperiksa lingkungan kerjanya	35 tenaga kerja	43.794	0	20	UMKM	100.000	20	UMKM	100
7	Meningkatkan Pengeluaran Perumahan dan Kosumsi Masyarakat	Menurunkan angka Pengangguran	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Presentase produktifitas kawasan transmigrasi</b>			40%		45%	<b>1.147.347</b>	46%		<b>1.278</b>
			peningkatan fungsi POKJA KTM tingkat provinsi	jumlah orang yang memahami fungsi POKJA KTM (tim POKJA)	16 orang (1 laporan)	79.020	16 orang (1 laporan)	39.633	16 orang (1 laporan)	81.520	16 orang (1 laporan)	81.	
			peningkatan kapaitas SDM bidang transmigrasi	jumlah warga transmigrasi KTM batu betumpang yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi	60 orang	0	40 orang	102.194	240 orang	389.388	270 orang	450	
			perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi	jumlah dokumen rencana kawasan transmigrasi	0	0			1 dokumen	280.815	1 dokumen	267	
	<b>Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan</b>		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Berkembangnya Satuan Kawasan Transmigrasi									
			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	jumlah SDM dalam rangak pemantapan satuan permukiman									
			<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>7.415.412</b>			<b>23.925.234</b>			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun 2023-2026.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal (APBD P) 2017	2023	2024	2025	2026	
		Target Kegiatan	Target Kegiatan	Target Kegiatan	Target Kegiatan	Target Kegiatan	Target Kegiatan
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	<b>Nilai Sakip PD</b>					77	
	Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	2 dokumen	2
	Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)	-	-	-	-	100	
	survey kepuasan pelayanan umum (angka)	-	-	-	-	100	
	survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	-	-	-	-	95	
2	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>						
	<b>Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan produktifitas (indikator outcome)</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,17</b>	
	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja		12 paket	25 paket	25 paket	30 paket	30

Jumlah lulusan SMK yang berpeluang utk bekerja			560 orang			
jumlah peserta sosialisasi pemagangan			30 org	30 org	50 org	50
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan Kios 3in1				1750 orang	2100 orang	2800 orang
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						
<b>Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi</b>						
<b>Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja</b>						
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	-	-	-	-		
Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Program	-	-	-	-		
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>						
Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	-	-	-	-	100 orang	150 orang
Jumlah laporan	-	-	-	-	7 kab/kota	7 kab/kota

7	<b>Program HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>						
	<b>Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial</b>						
	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	-	-	-	-	55 perusahaan	60 Perusahaan
	Penetapan Upah Minimum Provisni	-	-	-	-	1 rekomendasi	1 rekaomndasi
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>						
	<b>Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan</b>						
	persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	-	16 %	20 %
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						
	<b>Presentase produktifitas di kawasan transmigrasi yang diberdayakan(indikator outcome)</b>		<b>12%</b>	<b>12,5%</b>	<b>13%</b>	<b>13,5%</b>	
	jumlah laporan penguatan POKJA KTM (tim POKJA)	16 orang (1 laporan)	16 (1 laporan) org	16 (1 laporan) org	16 (1 laporan) org	16 (1 laporan) org	16 (1 laporan)
	jumlah warga transmigrasi yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi	0	0	150 orang	150 orang	180 orang	200
	jumlah dokumen rencana kawasan transmigrasi	0		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1
jumlah SDM dalam rangak pemantapan satuan pemukiman	-	-	-	-	30 orang	35 orang	

--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Tenaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan di dalam kebijakan dan program serta kegiatan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, dalam mengemban tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaa RI.

Rencana Strategis ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran satuan unit kerjadi lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan harapan seluruh anggota satuan unit kerja memiliki kesamaan pandang dalam mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan. Dengan komitmen yang telah ditetapkan bersama, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 ini selanjutnya harus dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang lebih rinci dan operasional setiap tahunnyaserta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) oleh masing-masing satuan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis ini, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antar

berbagai pemangku kepentingan dan seluruh stakeholders bidang ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan memberikan sumbangsih serta mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Disadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan agar Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 lebih berdaya guna dan berhasil guna.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Ir. Hj. ELFIYENA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620915 199003 2 001

### **Lampiran**

Bagan Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target Indikator Kinerja Utama dinas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Utama

JL. PULAU PONGOK AIR ITAM PANGKALPINAG